

RESEARCH ARTICLE

Kesiapan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dalam Menjalankan Kostratani di Kabupaten Teluk Wondama

Latarus Fangohoi^{1*}
Politeknik Pembangunan
Pertanian Manokwari
franleefanghoi@gmail.com

Agung Putra Patrik Ruru²
Politeknik Pembangunan
Pertanian Manokwari
agung@pertanian.go.id

Yudhisa Henry Prabowo³
Politeknik Pembangunan Pertanian
Manokwari
widyaningrum@pertanian.go.id

Hotmauli Febriana Pardosi⁴
Politeknik Pembangunan
Pertanian Manokwari
hotmaulipardosi@gmail.com

Artikel Info

Diterima 08/08/2023
Diterima dan disetujui 04/09/2023

Diterima dalam bentuk revisi 31/08/2023
Tersedia online 20/09/2023

Abstrak

Latar belakang: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kesiapan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam Menjalankan Kostratani di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. dalam Pelaksanaan kajian ini perlu menjawab bagaimana tentang kesiapan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat agar dapat berjalan dengan lancar.

Metode: Dalam kajian ini melibatkan 5 BPP dari 13 BPP yang ada di Kabupaten Teluk Wondama alasan hanya mengambil 5 BPP dikarenakan hanya 5 BPP tersebut yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Wondama, dari 5 BPP tersebut diambil sampel sebanyak 3 orang per BPP yang meliputi: Kepala BPP, sekretaris BPP, dan Penyuluh Pertanian. Setelah diambil sampel kemudian dibagikan kuesioner setelah dilihat hasil dari kuesioner kemudian data diolah, setelah diolah kemudian dibuat skor tentang sikap dan pendapat.

Hasil: Setelah dilaksanakan penelitian maka didapat hasil bahwa dari 5 BPP kebanyakan memiliki kekurangan seperti sumber daya manusia yang belum memadai, belum memahami dan belum ada Bimbingan Teknis tentang Kostratani, belum ada Koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintahan setempat tentang Kostratani, serta belum tersedia Komputer/PC. Meski demikian kelima BPP tersebut dapat direkomendasikan untuk menjalankan program Konstratani yang dapat dilihat dari indikator kesiapan BPP yang kemudian indikator tersebut harus ditingkatkan agar memenuhi syarat dalam program kostratani.

Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa BPP yang dapat direkomendasikan berdasarkan kesiapannya dapat diurutkan menjadi: (1) BPP Wondiboy, (2) BPP Wasior, (3) BPP Rasiei, (4) BPP Windesi, (5) BPP Teluk Duairi. Dari hasil tersebut dapat diajukan kepada Dinas Pertanian agar supaya bisa memprioritaskan BPP yang nilainya/skoranya lebih tinggi.

Kata kunci: Balai penyuluhan pertanian, Kesiapan, Kostratani

*Penulis Korespondensi: *Latarus Fangohoi, Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, franleefanghoi@gmail.com*

Sitasi: Fangohoi, L., Agung, P. P. R., Yudhisa, H. P., & Hotmauli, F. P. (2023). Kesiapan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dalam Menjalankan Kostratani Di Kabupaten Teluk Wondama. *Journal of Sustainable Agriculture Science*, 1(2), 65-75.



© 2023 Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari



Abstract

Background: This study aims to determine the Readiness of the Agricultural Extension Center (BPP) in Running Kostratani in Teluk Wondama Regency, West Papua Province. In carrying out this study, it is necessary to answer how the readiness of the Agricultural Extension Center (BPP) in Teluk Wondama Regency, West Papua Province, can run smoothly.

Method: In this study, it involved 5 BPPs out of 13 BPPs in Teluk Wondama Regency. The reason for only taking 5 BPPs was because only 5 of the BPPs were submitted by the Agriculture Service Office of Teluk Wondama Regency, of the 5 BPPs, 3 samples were taken per BPP which included: Head of BPP, BPP secretary, and Agricultural Extension Officer. After taking the sample then distributing the questionnaire after seeing the results of the questionnaire then the data is processed, after being processed then a score is made about attitudes and opinions.

Results: After carrying out the research, the results obtained were that of the 5 BPP, most of them had deficiencies such as inadequate human resources, did not understand and did not yet have Technical Guidance regarding Kostratani, there was no coordination and socialization with the local government regarding Kostratani, and computers/PC were not yet available. However, the five BPP can be recommended to run the Kostratani program which can be seen from the indicators of BPP readiness, which then these indicators must be improved so that they meet the requirements in the Kostratani program.

Conclusion: It can be concluded that BPPs that can be recommended based on their readiness can be sorted into: (1) BPP Wondiboy, (2) BPP Wasior, (3) BPP Rasiei, (4) BPP Windesi, (5) BPP Teluk Duairi. From these results, it can be submitted to the Department of Agriculture so that it can prioritize BPP with higher scores.

Keywords: Agricultural extension center, Kostratani, Readiness

PENDAHULUAN

Presiden RI mengamanatkan bahwa Menteri Pertanian diminta mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi 267 juta penduduk di seluruh Indonesia. Untuk melaksanakan amanat Presiden tersebut, Menteri Pertanian menjabarkan ke dalam program strategis yaitu dengan membangun satu data pertanian dalam satu sistem *Big Data* serta penguatan penyuluhan pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dikecamatan.

Data merupakan kekuatan utama dalam membangun ketahanan pangan kedepan, sehingga kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di sektor pertanian harus didasarkan pada data dan informasi lapangan yang akurat. Untuk memantapkan data pertanian tunggal (SATU DATA), Kementerian Pertanian melaksanakan verifikasi ulang dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Data pertanian akan dibangun dalam satu sistem Big Data dan disajikan secara komprehensif oleh Kementerian Pertanian melalui *Agriculture War Room (AWR)* sebagai pusat Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Sistem data dipersiapkan untuk dapat memonitor kegiatan pembangunan pertanian secara *real time* dengan basis data yang handal dan akurat. Hal ini sesuai dengan pendapat Ningsih (2021) bahwa di era Revolusi Industri 4.0 yaitu perkembangan teknologi ini, BPP dituntut untuk mampu mengikuti sesuai dengan era yang ada. Mulai dari sistem data base berbasis *cloud* dan sistem data yang dapat di akses oleh semua pihak. Perubahan era ini harus didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dalam perbaikan data, untuk menyelaraskan data *riil* di lapangan dan data yang tersimpan sehingga data di BPP mencakup semua aspek,

baik itu luasan lahan, dan data pertanian lainnya. Sekarang ini banyak industri yang beralih ke *Cloud* guna meningkatkan fleksibilitas dan melakukan inovasi secara lebih cepat. Dengan demikian, BPP mampu menyajikan data yang besar (*Big Data*), yang semua orang dapat meng-akses dan dapat diperbaharui secara *up to date*.

Jabaran visi tersebut Sesuai kebijakan Menteri Pertanian, operasionalisasi pembangunan pertanian berada pada tingkat lapangan, dimana unit kerja non struktural pertanian terendah adalah BPP dimana keberadaannya sampai pada tahun 2018 berjumlah 5.640 unit dan Penyuluh Pertanian sebagai ujung tombak dan garda terdepan ketahanan pangan nasional sampai pada tahun 2018 berjumlah 69.493 orang, yang terdiri atas 31.506 orang Penyuluh Pertanian ASN, 12.135 orang THLTB-PP dan Penyuluh Swadaya sebanyak 25.852 orang.

Harapan untuk menjadikan Indonesia maju dan mampu mencukupi kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat dapat terwujud, salah satunya dengan menggerakkan penyuluh pertanian yang didukung oleh petugas pertanian lainnya ditingkat kecamatan dan desa. BPP sebagai pusat gerakan dan layanan pembangunan pertanian di kecamatan, perlu dilakukan optimalisasi tugas, fungsi dan perannya, melalui penguatan data dan informasi dengan sistem berbasis IT sehingga dapat dikendalikan dengan baik oleh Kementerian Pertanian. Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) di BPP merupakan **pusat gerakan** yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian melalui koordinasi, sinergi, dan penyelarasan kegiatan pembangunan pertanian dikecamatan. Terkait dengan hal tersebut, secara teknis para penyuluh pertanian di BPP akan diperkuat dengan kemampuan dalam mengidentifikasi potensi, menggali, menganalisis dan menyajikan data dan informasi pertanian. Data dan Informasi disajikan melalui media digital yang mampu menggambarkan kondisi lapangan seperti memprediksi kapan waktu panen, posisi standing crop, serangan hama penyakit dan cara pengendaliannya, teknologi budidaya, peluang dan informasi dinamika pasar dalam dan luar negeri, sampai dengan informasi pergerakan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan lain-lain.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2020, BPP merupakan lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas, fungsi dan peran dalam: (a) menyusun program Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan program Penyuluhan Pertanian Kabupaten/kota; (b) melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program Penyuluhan Pertanian; (c) menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar; (d) mengembangkan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; (e) meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian Pemerintah, Swadaya, dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; (f) melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; (g) menumbuh kembangkan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian swadaya di desa/kelurahan (Posluhdes); dan (h) mengembangkan metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan, kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, Untuk itu, BPP sebagai KOSTRATANI harus didukung dengan kelembagaan yang solid, ketenagaan yang profesional, dan penyelenggaraan fungsi penyuluhan yang berbasis IT dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas berusaha tani sehingga produksi usaha pertanian mampu meningkatkan produktivitas, produksi, pendapatan dan kesejahteraan petani.

METODE

Kegiatan kajian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2021 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Wasior Kabupaten Teluk Wondama. Alat dan Bahan yang dapat dipergunakan dalam kajian ini sebagai berikut yaitu untuk alat terdiri dari Laptop, alat tulis menulis, kamera, papan lapangan. Bahan yang digunakan yaitu Kusioner wawancara, buku, tinta print dan kertas.

Jenis data yang digunakan meliputi; data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara, kusioner, observasi,. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari monografi kampung, distrik, instansi terkait, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan kajian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut yaitu wawancara, kuesioner dan observasi. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada PPL, dan koordinator BPP di distrik Wasior. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara sistimatis. Observasi yaitu pengamatan langsung pada kondisi obyek lapangan.

Teknik Pengambilan Sampel

Purposive sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dalam bahasa sederhana *purposive sampling* itu dapat dikatakan sebagai secara sengaja mengambil sampel tertentu (jika orang maka berarti orang-orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria) sampel (jangan lupa yang mencerminkan populasinya).

Purposive sampling juga disebut *judgmental sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan "penilaian" (*judgment*) peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel. Oleh karenanya agar tidak sangat subjektif, peneliti harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel dimaksud (tentu juga populasinya) agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian (memperoleh data yang akurat).

Memilih sampel berdasarkan *purposive sampling* tergantung kriteria apa yang digunakan. Jadi ditentukan dulu apa kriteria-kriteria sampel yang diambil. Misalnya di suatu kelas, peneliti mau melihat gambaran prestasi siswa yang mengikuti kegiatan osis, berarti sampel tidak bisa secara acak karena tidak setiap siswa di kelas tersebut merupakan anggota osis. Siswa yang diambil sebagai sampel tersebut haruslah ditentukan sendiri oleh peneliti dan ada kriterianya

Syarat-syarat menentukan sampel pada *purposive sampling* :

- Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan
- Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat- sifat, atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi
- Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.

Kelebihan Metode *Purposive Sampling*

- Sampel ini dipilih sedemikian rupa, sehingga relevan dengan desain penelitian
- Cara ini relatif mudah dan murah untuk dilaksanakan
- Sampel yang dipilih adalah individu yang menurut pertimbangan penelitian dapat didekati.

Kekurangan Metode *Purposive Sampling*

- Tidak ada jaminan sepenuhnya bahwa sampel itu representatif seperti halnya dengan sampel acakan atau random
- Setiap sampling yang acakan atau random yang tidak memberikan kesempatan yang sama untuk dipilih kepada semua anggota populasi
- Tidak dapat dipakai penggolongan statistik guna mengambil kesimpulan

Metode Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan pada 5 BPP di Kabupaten Teluk Wondama, dengan mengambil sampel pada tiap BPP 3 orang penyuluh di wilayah kerja BPP Teluk Wondama. Kombinasi metode yang digunakan yakni metode eksperimental dengan menelaah dan mengkaji kesiapan BPP dalam menjalankan Kostratani yang didesain dan diterapkan dalam penelitian, metode *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengungkap dan memahami permasalahan serta jalan keluar berdasarkan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) di BPP, sasaran, serta metode aksi melalui pelatihan dengan materi yang didesain berdasarkan hasil untuk Kesiapan BPP Dalam Menjalankan Kostratani.

1. Analisis Data

Setelah diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan *Cleaning data/editing data dan tabulasi*, selanjutnya dilakukan analisa dan interpretasi data dengan presentase statistik deskriptif, statistik inferensial tergantung tujuan dan pertimbangan yang akan dihasilkan.

2. Menerapkan Indikator

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan yang dicapai, dapat berupa indikator fisik dan non-fisik.

- a. Indikator fisik atau ukuran yang diberikan berdasarkan kondisi fisik yang diamati.
- b. Untuk indikator non- fisik atau ukuran yang tidak dengan mudah diamati secara fisik melainkan harus digali melalui pertanyaan yang disampaikan, misalnya pada pengukuran perilaku.
- c. Indikator untuk ukuran perilaku dalam evaluasi penyuluhan pertanian meliputi: Pendapat dan Sikap

Variabel Pengukuran

Penyusun menggunakan kuesioner atau angket dalam mengumpulkan data yang didalamnya terdapat seperangkat daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat. Ukur berupa lembar kuesioner berskala Guttman, data yang diperoleh berupa data interval atau rasio dikotomi (dua alternatif) yaitu "Ya" dan "Tidak" sehingga dengan demikian penyusun berharap mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang diteliti. Adapun tahapan proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengambilan data dilakukan oleh penyusun sendiri dengan mendatangi subjek penelitian.

2. Penyusun menjelaskan kepada calon responden mengenai teknik pengisian kuesioner dan apabila ada sesuatu yang kurang jelas, calon responden dipersilahkan untuk bertanya.
3. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner secara langsung oleh penyusun dibantu oleh rekan-rekan disekitar calon responden, dan setelah pengisian selesai, kuesioner dikumpulkan kepada penyusun.
4. Data primer didapat dari hasil pengisian kuesioner yang berisi data mengenai permasalahan yang diberikan.
5. Setelah data didapat proses selanjutnya kemudian analisa data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan Sampel

Dalam penelitian tentang Kesiapan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kabupaten Teluk Wondama sampel yang diambil adalah sebanyak 15 orang dari 5 BPP yang siap untuk menjalankan Kostratani. Yaitu dari BPP Wondiboi sebanyak 3 orang, BPP Wasior Sebanyak 3 orang, BPP Rasiei sebanyak 3 orang, BPP Windesi sebanyak 3 orang, BPP Teluk Duairi Sebanyak 3 orang. Dari pengambilan sampel tersebut sampel yang diambil yaitu dari masing-masing Pimpinan BPP yaitu : kepala BPP, Staff BPP dan Penyuluh Pertanian. Alasan diambilnya 5 BPP dikarenakan hanya 5 BPP tersebut yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Wondama.

Hasil Pe-Rengkingan kelebihan dan Kekurangan di 5 BPP

Hasil dari rekapan kuesioner dari 5 BPP dan dilakukan scoring maka didapat hasil berupa tabel berisi kelebihan dan kekurangan serta indikator kesiapan dari setiap BPP sampel yang telah ditentukan. Data kelebihan dan kekurangan serta indikator kesiapan BPP Wondiboy dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Kelebihan dan kekurangan BPP Wondiboy

BPP Wondiboy		
No	Kelebihan	Kekurangan
1	Sudah mengerti tentang kostratani	Belum ada bimtek tentang kostratani
2	Jaringan internet sudah bagus	Belum ada koordinasi dengan pemerintah
3	SDM sudah Memadai	
4	Sudah ada ruangan khusus untuk Kostratani	
5	Sudah pernah mengikuti Pelatihan Kostratani	
6	Sudah bisa menjalankan Komputer/PC	
7	Sudah Tersedia Komputer	
8	Sudah ada Admin IT	

Berdasarkan Tabel 1 diketahui beberapa kekurangan yang terdapat di BPP Wondiboy salah satunya belum adanya bimtek tentang kostratani. Bimtek adalah salah satu upaya penting dalam peningkatan pengetahuan. Menurut Widyastuti et al. (2021) bahwa Bimbingan Teknis atau sering disingkat Bimtek memiliki pengertian sebagai sebuah layanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga ahli atau profesional dibidangnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Seiring perkembangan jaman, Bimbingan Teknis atau Bimtek memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kualitas tersebut.

Tabel 2. Indikator kesiapan BPP Wondiboy

Indikator		Ada	Tidak Ada
SDM			
➤	Penyuluh	√	
➤	Admin IT	√	
➤	Staf BPP	√	
Fasilitas			
➤	Komputer	√	
➤	Ruangan	√	
➤	Internet	√	
➤	Jaringan Internet	√	

Bisa dilihat dari Tabel 2 tentang Indikator kesiapan BPP Wondiboy bahwa BPP tersebut siap untuk mengikuti Kostratani dikarenakan sudah memenuhi syarat Sumber Daya Manusia maupun Fasilitas Sarana dan Prasarana sudah memadai dibandingkan dengan BPP yang lain jadi untuk Kesiapan BPP Wondiboy sudah siap untuk mengikuti Kostratani. Akan tetapi ada kendala yaitu BPP Wondiboy belum pernah diadakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Langsung kepada Pimpinan maupun Anggota BPP. Kelebihan dan kekurangan berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan serta indikator kesiapan dari BPP Wasior dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Kelebihan dan kekurangan BPP Wasior

BPP Wasior		
No	Kelebihan	Kekurangan
1	Sudah mengerti tentang kostratani	Belum ada bimtek tentang kostratani
2	Jaringan internet sudah bagus	Belum ada koordinasi dengan pemerintah
3	SDM sudah Memadai	Belum ada admin IT
4	Sudah ada ruangan khusus untuk Kostratani	Belum tersedia komputer
5	Sudah pernah mengikuti Pelatihan Kostratani	
6	Sudah bisa menjalankan Komputer/PC	
7	Sudah tersedia ruangan khusus untuk Kostratani	

Berdasarkan Tabel 3, salah satu kekurangan di BPP Wasior adalah belum ada admin IT dan belum tersedianya komputer. Kemampuan menguasai teknologi seperti itu sangat penting mengingat perkembangan jaman sekarang ini sehingga sangat diperlukan teknologi itu dan SDM yang handal untuk mengoperasikannya. Teknologi tersebut digunakan untuk membantu proses penyuluhan baik dari segi pemanfaatan pembuatan media ataupun untuk menyebarluaskan informasi/ inovasi terbaru kepada sasaran. Menurut Pakpahan et al (2021) bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mempunyai dampak terhadap kemajuan Balai Penyuluhan Pertanian dalam mendiseminasikan informasi pertanian. Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam Pembangunan pertanian memerlukan kompetensi dari pengguna teknologi informasi dan komunikasi tersebut.

Tabel 4. Indikator kesiapan BPP Wasior

Indikator		Ada	Tidak Ada
SDM			
➤	Penyuluh	√	
➤	Admin IT		√
➤	Staf BPP	√	
FASILITAS			
➤	Komputer		√
➤	Ruangan	√	
➤	Internet	√	
➤	Jaringan Internet	√	

Dari Tabel 4 yaitu data Indikator kesiapan BPP Wasior ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu belum ada admin untuk pengguna IT dan belum tersedia Komputer akan tetapi untuk SDM-nya Sudah ada yaitu; Penyuluh dan Staff BPP begitupun Fasilitas/Sarana dan Prasarana BPP Wasior sudah mempunyai; ruangan, internet, dan jaringan internetnya sudah lancar, maka BPP Wasior sudah siap untuk mengikuti Kostratani, akan tetapi ada kendala belum berjalannya Kostratani dikarenakan Belum ada Bimbingan Teknis (BIMTEK) tentang Kostratani dari Pemerintah Pertanian Pusat. Data kelebihan dan kekurangan serta indikator kesiapan BPP Rasiei dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5. Kelebihan dan kekurangan BPP Rasiei

BPP Rasiei		
No	Kelebihan	Kekurangan
1	Sudah mengerti tentang kostratani	Belum ada bimtek tentang kostratani
2	Jaringan internet sudah bagus	Belum ada koordinasi dengan pemerintah
3	Sudah ada ruangan khusus untuk Kostratani	Belum ada admin IT
4	Sudah pernah mengikuti Pelatihan Kostratani	Belum tersedia komputer
5	Sudah bisa menjalankan Komputer/PC	SDM belum memadai

Dari Tabel 5 diketahui beberapa kekurangan dari BPP Rasiei yang mengakibatkan pelaksanaan kostratani tidak dapat berjalan dengan baik karena rendahnya kualitas SDM yang juga berdampak dari tidak adanya pelaksanaan bimtek dari Kementerian Pertanian pusat dan koordinasi dengan pemerintah serta belum tersedianya teknologi seperti komputer. Menurut Maryam (2018) bahwa dalam upaya pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, perlu upaya peningkatan kualitas kinerja Penyuluh Pertanian melalui peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan teknis pertanian, dan pengembangan *soft skill*.

Tabel 6. Indikator kesiapan BPP Rasiei

Indikator	Ada	Tidak Ada
SDM		
➤ Penyuluh	√	
➤ Admin IT		√
➤ Staf BPP	√	
FASILITAS		
➤ Komputer		√
➤ Ruangan	√	
➤ Internet	√	
➤ Jaringan Internet	√	

Berdasarkan Tabel 6 indikator kesiapan BPP Rasiei bahwa BPP Rasiei sudah siap untuk mengikuti Kostratani akan tetapi ada faktor yang mempengaruhi atau menghambat yaitu di BPP Wasior belum terdapat Admin dan belum tersedianya Komputer, akan tetapi BPP Rasiei sudah siap untuk menjalankan Kostratani dikarenakan SDM nya sudah hampir memadai dan SAPRAS nya sudah bisa memenuhi syarat. Data kelebihan dan kekurangan serta indikator kesiapan BPP Windesi dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.

Tabel 7. Kelebihan dan kekurangan BPP Windesi

BPP Windesi		
No	Kelebihan	Kekurangan
1	Jaringan internet sudah bagus	Belum ada bimtek tentang kostratani

2	SDM sudah Memadai	Belum ada koordinasi dengan pemerintah
3	Sudah ada ruangan khusus untuk Kostratani	Belum ada admin IT
4	Sudah bisa menjalankan Komputer/PC	Belum tersedia komputer
5	Sudah tersedia ruangan khusus untuk Kostratani	Belum mengetahui tentang Kostratani
6		Belum pernah mengikuti Pelatihan Kostratani
7		Belum tersedia computer

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa BPP Windesi memiliki permasalahan atau kekurangan yang hampir sama dengan BPP Rasiei. Pembedanya adalah BPP Windesi memiliki kekurangan yang lebih banyak yaitu SDM-nya belum mengetahui tentang Konstratani dan belum pernah mengikuti pelatihan tentang hal tersebut.

Tabel 8. Indikator kesiapan BPP Windesi

Indikator		
SDM	Ada	Tidak Ada
➤ Penyuluh	√	
➤ Admin IT		√
➤ Staf BPP	√	
FASILITAS		
➤ Komputer		√
➤ Ruang	√	
➤ Internet		√
➤ Jaringan Internet		√

Bisa dilihat dari Tabel 8 yaitu indikator kesiapan BPP Windesi masih tergolong belum memenuhi syarat untuk menjalankan Kostratani dikarenakan dilihat dari Sarana dan Prasarannya belum memadai dikarenakan hanya ruangnya saja yang ada akan tetapi Jaringan Internet, internet, dan Admin IT nya belum tersedia maka dari itu dikatakan BPP Windesi sudah siap untuk menjalankan Kostratani akan tetapi belum memenuhi syarat. Data kelebihan dan kekurangan serta indikator kesiapan BPP Windesi dapat dilihat pada Tabel 9 dan Tabel 10.

Tabel 9. Kelebihan dan kekurangan BPP Teluk Duairi

BPP Teluk Duairi		
No	Kelebihan	Kekurangan
1	Jaringan internet sudah bagus	Belum ada bimtek tentang kostratani
2	SDM sudah Memadai	Belum ada koordinasi dengan pemerintah
3	Sudah ada ruangan khusus untuk Kostratani	Belum ada admin IT
4	Sudah bisa menjalankan Komputer/PC	Belum tersedia komputer
5	Sudah tersedia ruangan khusus untuk Kostratani	Belum mengetahui tentang Kostratani
6		Belum pernah mengikuti Pelatihan Kostratani
7		Belum tersedia computer

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa BPP Teluk Duairi memiliki kekurangan yang sama dengan BPP Windesi. Artinya bahwa SDM yang berada di BPP Teluk Duairi belum mumpuni untuk pengetahuan tentang kostratani akibat belum mengetahui dan belum pernah mengikuti pelatihan serta bimtek tentang kostratani.

Tabel 10. Indikator kesiapan BPP Teluk Duairi

Indikator		
SDM	Ada	Tidak Ada

➤ Penyuluh	√	
➤ Admin IT		√
➤ Staf BPP	√	
FASILITAS		
➤ Komputer		√
➤ Ruang	√	
➤ Internet		√
➤ Jaringan Internet		√

Berdasarkan hasil pada Tabel 10 bahwa BPP Teluk Duairi belum memenuhi syarat untuk menjalankan Kostratani dikarenakan dilihat dari Sarana dan Prasarana nya belum memadai dikarenakan hanya ruangnya saja yang ada akan tetapi Jaringan Internet, internet, dan Admin IT nya belum tersedia maka dari itu dikatakan BPP Teluk Duairi sudah siap untuk menjalankan Kostratani akan tetapi belum memenuhi syarat.

Data Primer

Data primer yang didapat pada saat dilapangan melalui kuesioner yaitu belum adanya Bimbingan Teknis (BIMTEK) tentang kostratani, belum ada juga koordinasi dengan pemerintah sudah ada pelatihan Kostratani tetapi hanya melalui Virtual lewat Zoom Meeting. Pernah ada Satgas/Satuan tugas di Dinas Pertanian tetapi tidak ada Honor nya sehingga diberhentikan oleh dinas Pertanian. Penyuluhan Kostratani juga sudah pernah dilakukan Penyuluhan di tiap-tiap BPP di Kabupaten Teluk Wondama tetapi penyuluhan melalui Perorangan dengan mendatangi BPP tersebut dengan menggunakan Media: Leaflet, Baliho, Stiker. Kostratani di Kabupaten Teluk Wondama Sudah dianggarkan oleh Dinas Pertanian di Tahun 2021.

Dari informasi yang didapat dari Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Wondama alasan merekomendasikan 5 BPP dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan pertanian di Kabupaten Teluk Wondama hanya 5 BPP tersebut yang aktif dalam kegiatan, dan 5 BPP tersebut yang gampang dijangkau oleh Dinas.

Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dari Informan langsung yaitu dari kepala Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Wondama, dan aparat kampung setempat kemudian direkapitulasi untuk dimasukkan kedalam hasil Kajian.

Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan dalam Kesiapan BPP dalam menjalankan Kostratani yaitu:

- Masih ada beberapa BPP yang Sumber Daya Manusia (SDM) nya belum memadai
- Terdapat Beberapa BPP yang belum memahami tentang Kostratani
- Belum ada Koordinasi dan sosialisasi dengan Pemerintahan setempat tentang Kostratani.
- Di Beberapa BPP belum Tersedia Komputer/PC
- Belum ada sama sekali Bimbingan Teknis tentang Kostratani.

Strategi Pemecahan Masalah

Adapun strategi pemecahan masalah dalam kesiapan BPP dalam menjalankan Kostratani yaitu: yang pertama harus ada koordinasi dengan pemerintah setempat, dan dengan melakukan pelatihan kepada setiap penyuluh Pertanian agar SDM yang mereka miliki bisa dilatih dan dikembangkan dan perlu juga Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada Penyuluh agar mereka lebih memahami dan mendalami

tentang Kostratani dan mereka dapat mengetahui kelebihan-kelebihan tentang kostratani dan perlu juga dilakukan pengadaan dari Dinas Pertanian tentang pengadaan Komputer/PC agar Kostratani bisa berjalan dengan lancar perlu juga ada Koordinasi dan sosialisasi mengenai Kostratani kepada Pemerintah Setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 13 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang ada di Kabupaten Teluk Wondama hanya terdapat 5 BPP saja yang memenuhi syarat atau yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Wondama, dari 5 yaitu: (1) BPP Wondiboy, (2) BPP Rasiey (3) BPP Windesi (4) Teluk Duairi, (5) Wasior, dari 5 BPP tersebut dilihat kelayakan SDM dan Kesiapan BPP yang akan menjalankan Kostratani nanti, agar jika bantuan kostratani tidak mencukupi 5 BPP tersebut maka ada data kesiapan BPP yang sudah diuji melalui Kuesioner yang kemudian disajikan dalam bentuk pe-Rengkingan.

Untuk saran agar sebaiknya dilakukan pelatihan dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) terlebih dahulu agar dapat bantuan Kostratani BPP yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian bisa berjalan dengan baik.

PERNYATAAN KONTRIBUSI

Dalam artikel ini, Latarus Fangohoi berperan sebagai kontributor utama dan kontributor korespondensi, sementara Agung Putra Patrik Ruru, Yudhisa Henry Prabowo dan Hotmauli Febriana Pardosi sebagai kontributor anggota

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2020). Petunjuk Pelaksanaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Di Kecamatan. Jakarta.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 13/Kpts/OT.050/I/02/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan.
- Maryam, S. (2018). Kinerja penyuluh pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong. *Katalogis*, 6(6): 115-125.
- Ningsih, W. (2021). Perancangan Aplikasi Peta Digital (Carry Map) Guna Opt imalisasi Pengelolaan Data di BPP Kecamatan Sinjai Utara, Sulawesi Selatan. *AgriHumanis* 2(1): 60-70.
- Pakpahan, T. E., Wicaksono, M., & Hrp, Q. H. (2021). peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pusat data informasi pertanian dalam mendukung program Kostratani. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 14(1), 46-67.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019, Tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian, Jakarta.
- Widyastuti, A., Pujiastuti, E., & Wahyuningrum, R. D. (2021). Peran Bimtek Virtual Dalam Peningkatan Pengetahuan Penyuluh Pertanian Di Daerah Istimewa Yogyakarta. In *Prosiding Seminar Nasional Tahun 2021* (Vol. 1, No. 1).